

## **BAB V**

### **KESIMPULAN & SARAN**

Berdasarkan hasil laporan dan pembahasan mengenai Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### **5.1 Kesimpulan**

Kontribusi pajak dan retribusi parkir terhadap PAD kota Bandar Lampung masuk dalam kriteria sangat kurang. Hal ini ditunjukkan pada periode 2014-2018 dengan rasio kontribusi rata-rata persentase 1,67% hal tersebut dikarenakan belum mencapai target yang ditetapkan. Sementara retribusi parkir dalam klasifikasi kriteria kontribusi dinyatakan masih tergolong sangat kurang dalam kurun waktu 2014-2018 dengan rasiokontribusi retribusi parkir rata-rata persentase 1,03% hal ini juga disebabkan masih kurangnya pengawasan dalam penarikan retribusi parkir di tepi jalan umum.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dalam proses penggalian dan pengelolaan dana untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), masyarakat harus dilibatkan dalam pemungutan pajak, retribusi, dan lain-lain yang menjadi komponen PAD. Pemerintah harus terbuka dan transparansi dalam dalam penggunaan dana PAD digunakan untuk apa saja, sehingga rasa kepercayaan masyarakat Provinsi Lampung dapat meningkat sehingga akan berimbas baik kepada pemerintah daerah tersebut. Imbas baik yang dimaksud penulis dalam hal ini adalah dengan adanya keterbukaan dan transparansi pemerintah dalam pengelolaan dana, masyarakat semakin giat dan teratur dalam membayarkan kewajibannya yaitu berupa pajak, retribusi, dan lain-lain.
2. Bagi masyarakat Lampung diharapkan bisa bekerjasama dengan baik dengan pemerintah daerah dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan penerimaan pajak yang baik, maka pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan dan

pembangunan yang baik pula untuk fasilitas masyarakat.

3. Bagi akademis diharapkan mampu memberikan hal yang baru dalam perkembangan ekonomi terhadap pemerintahan daerah sehingga pemerintah mampu untuk menjalankan program-program pengalokasian dana PAD dengan jujur, transparan, rapi, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.